

Arah Baru Politik di Era Digital (Perspektif Generasi Milenial di Media Sosial)

Dinda Aurellia¹, Katimin²

^{1, 2*}Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹dinda0404213024@uinsu.ac.id, ²profkatimin2@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah secara signifikan mengubah lanskap politik, terutama dengan munculnya media sosial sebagai platform utama untuk interaksi politik di antara generasi milenial. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, generasi milenial cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan mendiskusikan masalah politik melalui media sosial dibandingkan dengan metode konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial membentuk persepsi dan keterlibatan politik generasi milenial sambil menyoroti tantangan seperti penyebaran tipuan, polarisasi opini, dan literasi digital yang rendah. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini meneliti pola konsumsi informasi politik di media sosial dan dampaknya terhadap partisipasi politik milenial. Temuan menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat kunci dalam meningkatkan kesadaran politik dan memobilisasi dukungan politik, tetapi juga bertindak sebagai saluran untuk informasi yang salah, berpotensi mempengaruhi persepsi politik publik. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa partisipasi politik generasi milenial didasarkan pada informasi yang akurat dan kredibel. Dengan memahami dinamika politik digital ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi komunikasi politik yang lebih efektif dan inklusif untuk generasi milenial.

Kata Kunci: Politik Digital, Generasi Milenial, Media Sosial, Partisipasi Politik, Literasi Digital.

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed the political landscape, particularly with the rise of social media as the primary platform for political interaction among the millennial generation. As a generation that grew up in the digital era, millennials tend to be more active in accessing, sharing, and discussing political issues through social media compared to conventional methods. This study aims to analyze how social media shapes millennials' political perceptions and engagement while highlighting challenges such as the spread of hoaxes, opinion polarization, and low digital literacy. Using a qualitative descriptive approach, this research examines the patterns of political information consumption on social media and its impact on millennial political participation. The findings indicate that social media serves as a key tool in raising political awareness and mobilizing political support, but it also acts as a channel for misinformation, potentially influencing public political perceptions. Therefore, enhancing digital literacy is essential to ensure that millennials' political participation is based on accurate and credible information. By understanding this digital political dynamic, this study is expected to provide insights for policymakers in designing more effective and inclusive political communication strategies for the millennial generation.

Keywords: Digital Politics, Millennial Generation, Social Media, Political Participation, Digital Literacy.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat menentukan pemimpin dan arah kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks kekinian, dinamika Pilkada tidak terlepas dari transformasi digital, di mana generasi

milenial (usia 20–40 tahun) menjadi kelompok pemilih dominan sekaligus pengguna aktif media sosial. Pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan berintegritas tidak hanya diukur melalui mekanisme konvensional, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi politik di ruang digital. Di Kota Medan, misalnya, maraknya kampanye melalui platform seperti Instagram dan TikTok menunjukkan pergeseran strategi politik yang menyasar partisipasi milenial (KPU Medan, 2024). Namun, di balik potensi partisipasi ini, ancaman seperti politik uang digital dan disinformasi justru semakin kompleks, khususnya karena milenial rentan menjadi sasaran sekaligus penyebar konten bermasalah akibat literasi digital yang parsial (Husaini et al., 2024).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil. Namun, tantangan pengawasan Pilkada 2024 di Kota Medan tidak hanya bersifat struktural (seperti keterbatasan SDM dan teknologi), tetapi juga kultural—khususnya dalam menyikapi perilaku milenial di media sosial. Politik uang, misalnya, tidak lagi dilakukan secara fisik, tetapi berevolusi menjadi bentuk transfer digital (e-wallet) atau giveaway konten viral yang menyasar milenial (Maarif dan Arifin, 2024). Di sisi lain, rendahnya literasi digital membuat milenial Medan kesulitan membedakan antara informasi valid dan hoaks, sehingga memperburuk kualitas diskusi publik (Husaini et al., 2024). Padahal, potensi kolaborasi Bawaslu dengan milenial—misalnya melalui pelaporan pelanggaran via aplikasi atau partisipasi dalam kampanye anti-hoaks belum dimanfaatkan secara optimal (Jurnal Transformative, 2024).

Penelitian terdahulu banyak membahas peran Bawaslu dan tantangan pengawasan pemilu, namun masih mengabaikan perspektif milenial sebagai subjek yang unik dalam ekosistem politik digital. Studi Pagiling (2024) tentang keterbatasan pengawasan di Medan, misalnya, hanya menyoroti aspek regulasi teknis tanpa mengeksplorasi bagaimana milenial memengaruhi—atau dipengaruhi—oleh dinamika tersebut. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana interaksi generasi milenial di media sosial membentuk tantangan dan peluang bagi Bawaslu dalam mengawasi integritas Pilkada 2024? (2) Apa strategi adaptif yang dapat dirumuskan untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu dan partisipasi milenial di ruang digital?

Dengan fokus pada perspektif milenial, penelitian ini menawarkan rekomendasi taktis berbasis realitas digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pengawasan pemilu. Contohnya, optimalisasi platform media sosial sebagai alat edukasi politik bagi milenial atau pemanfaatan fitur *crowdsourcing* untuk memperluas jangkauan pengawasan Bawaslu. Temuan ini diharapkan tidak hanya memperkaya studi demokrasi digital, tetapi juga menjadi referensi bagi lembaga pengawas pemilu dalam merancang strategi yang selaras dengan perilaku generasi muda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalamai pemahaman, pandangan, dan partisipasi politik generasi milenial melalui media sosial di era digital. Ramadhan (2021) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku dan sikap politik. Partisipan wawancara dipilih dengan kriteria khusus, yakni usia 22–40 tahun (merujuk kategori milenial versi KPU), aktif berpartisipasi dalam diskusi politik di media sosial (minimal 3 unggahan atau komentar politik per minggu dalam 6 bulan terakhir), serta memiliki pengikut (follower) minimal 1.000 akun atau terlibat dalam komunitas digital politik di Kota Medan. Proses seleksi informan melibatkan observasi awal terhadap konten media sosial mereka untuk memastikan konsistensi keterlibatan dalam isu Pilkada 2024. Sebanyak 15 informan terpilih mewakili beragam latar belakang profesi, seperti mahasiswa, pekerja kreatif, dan aktivis LSM, yang diidentifikasi melalui penelusuran hashtag *#PilkadaMedan2024* dan rekomendasi komunitas lokal.

Observasi difokuskan pada platform Instagram dan Twitter dengan pertimbangan bahwa Instagram menjadi platform paling populer bagi milenial Medan (87% pengguna aktif usia 20–40 tahun menurut data KPU setempat), sementara Twitter dipilih karena intensitas diskusi politiknya yang tinggi melalui fitur *thread* dan *retweet*. Konten yang diobservasi mencakup unggahan informan terkait Pilkada (foto, video, caption), komentar publik pada konten politik akun kandidat, tren hashtag (seperti *#MedanMaju2024*), serta pola interaksi (*like, share, reply*) selama periode kampanye (Januari–November 2024). Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis artikel opini milenial di blog/platform citizen journalism, statistik *engagement* akun media sosial kandidat, dan laporan Bawaslu terkait pelanggaran kampanye digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa generasi milenial memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam partisipasi politik di era digital. Analisis data kualitatif berfokus pada penggalian makna dari data yang dikumpulkan. Budoyono (2020) menggarisbawahi bahwa penggunaan bahasa di media sosial sangat mempengaruhi cara informasi politik disampaikan dan diterima. Generasi milenial menggunakan bahasa yang lebih informal dan mudah diakses, yang menciptakan keterhubungan dengan audiens muda lainnya. Ini penting untuk membangun narasi politik yang relevan dan menarik. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial cenderung lebih skeptis terhadap institusi politik tradisional, dan lebih memilih untuk terlibat dalam dialog terbuka melalui media sosial (Strauss, 2003). Mereka terlibat aktif dalam kampanye digital, menyuarakan isu sosial, dan membentuk opini publik melalui platform seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *TikTok*. Media sosial telah mengubah wajah politik di Indonesia, memberikan ruang bagi generasi milenial untuk terlibat langsung dalam perdebatan politik dan kampanye sosial yang sebelumnya terbatas pada saluran tradisional. Melalui platform digital, mereka tidak hanya dapat mengakses informasi politik dengan mudah, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam menyebarkan ide-ide dan mengorganisir gerakan sosial (Baihaqi, 2020). Mahfud MD (2007) menyatakan bahwa gerakan sosial di Indonesia telah mengalami transformasi seiring kemajuan teknologi.

Partisipasi politik generasi milenial dalam konteks Pilkada dan pengawasan pemilu oleh Bawaslu di Indonesia menunjukkan dinamika unik yang dimediasi oleh penggunaan media sosial. Temuan penelitian mengungkap bahwa 72% responden milenial di wilayah urban menggunakan platform seperti Instagram dan TikTok sebagai sumber utama informasi terkait program kandidat Pilkada dan pelaporan pelanggaran pemilu melalui fitur Bawaslu Now (Baihaqi, 2020). Sebagai contoh, dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, kelompok relawan muda #JakartaMuda memanfaatkan TikTok untuk menyebarkan rekam jejak kandidat dalam format video pendek yang kreatif. Aktivitas ini tidak hanya mencerminkan partisipasi simbolik, seperti membagikan konten politik (Sukmajati, 2019), tetapi juga mendorong keterlibatan substansial melalui kolaborasi dengan Bawaslu dalam melaporkan indikasi politik uang (Nasution, 2020).

Media sosial juga menjadi alat kritis generasi milenial dalam mengawasi kinerja Bawaslu. Analisis data kualitatif menunjukkan bahwa 65% milenial di Surabaya menggunakan Instagram untuk mendiskusikan transparansi proses penghitungan suara, sementara 40% di antaranya aktif mengkritik lambannya respons Bawaslu terhadap pelanggaran di media sosial (Indrawan dkk., 2023). Fenomena ini sejalan dengan teori demokrasi deliberatif Habermas (1989), di mana ruang publik digital memungkinkan milenial berperan sebagai *watchdog* pemilu melalui dialog terbuka, meskipun partisipasi ini masih terbatas pada isu-isu populer seperti inklusivitas penyandang disabilitas atau pencegahan hoaks (Afriandi, 2020).

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi milenial di media sosial rentan dimanipulasi oleh strategi pencitraan politik elite. Sebanyak 58% responden mengaku terpapar konten kampanye Pilkada yang menggunakan *paid publicity* di Instagram, seperti endorsemen selebritas atau narasi populis yang mengaburkan substansi kebijakan (Azhar, 2017). Hal ini memperkuat temuan Sitorus (2024) bahwa polarisasi politik di media sosial meningkat tajam selama Pilkada, terutama di kalangan milenial dengan literasi digital rendah. Meskipun media sosial membuka ruang partisipasi, keterlibatan mereka seringkali bersifat dangkal—hanya 30% responden yang mampu menjelaskan visi-misi kandidat secara utuh di luar narasi viral (Afrita, 2024).

Temuan ini mempertegas perlunya integrasi antara Bawaslu dan platform digital untuk meningkatkan akuntabilitas pemilu. Studi kasus pada aplikasi Bawaslu Now menunjukkan bahwa 80% laporan pelanggaran pemilu dari milenial bersifat valid, namun hanya 45% yang ditindaklanjuti secara terbuka (Zis dkk., 2021). Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan strategi kolaborasi tripartit antara Bawaslu, aktivis muda, dan platform media sosial dalam merancang mekanisme pelaporan yang lebih responsif, seperti integrasi chatbot AI untuk verifikasi data real-time (Sujarwani, 2014).

Media sosial kini berfungsi sebagai alat mobilisasi massa dan alat perjuangan isu sosial. Generasi milenial mengambil peran penting dalam dinamika ini, di mana mereka mampu menciptakan solidaritas digital untuk isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, atau keadilan sosial. Munculnya gerakan sosial-politik berbasis online yang digerakkan oleh kalangan netizen kelas menengah Indonesia secara langsung berimplikasi pada representasi dan partisipasi publik dalam demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang alternatif bagi masyarakat, khususnya generasi milenial, untuk menyuarakan aspirasi, membangun solidaritas isu, serta mengorganisir tindakan kolektif tanpa melalui struktur politik konvensional (Afriandi, 2020).

Pola partisipasi ini tidak bersifat formal seperti mengikuti organisasi politik, melainkan lebih cair, spontan, dan berbasis isu. Temuan ini selaras dengan pendapat Sukmajati (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi politik generasi milenial di media sosial umumnya bersifat simbolik dan ekspresif, seperti membagikan konten politik atau menggunakan tagar tertentu, namun belum mencapai tingkat partisipasi politik yang substansial. Partisipasi seperti ini sering kali dilakukan untuk menunjukkan identitas sosial atau posisi moral, bukan sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa media sosial telah membuka kanal baru dalam proses demokratisasi, di mana partisipasi publik tidak lagi bergantung pada keanggotaan partai atau institusi formal, melainkan pada keterlibatan langsung melalui jaringan digital yang lebih terbuka dan partisipatif (Nugroho, 2020). Kecenderungan ini sesuai dengan pemikiran Kaplan dan Haenlein yang menyatakan bahwa media sosial mengubah pola komunikasi tradisional menjadi interaktif dan demokratis (Kaplan & Haenlein, 2010). Generasi milenial pun menunjukkan ketertarikan pada isu-isu aktual ketimbang loyalitas terhadap partai politik, yang menunjukkan pergeseran pola identitas politik di era digital (Jones, 2020). Nasution (2020) menekankan bahwa demokrasi digital memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas. Di era ini, generasi milenial memiliki akses yang lebih besar untuk terlibat dalam diskusi politik melalui media sosial. Hal ini menciptakan ruang baru bagi pemilih muda untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik secara lebih aktif.

Namun, temuan juga menunjukkan bahwa keterlibatan ini masih bersifat dangkal dan rentan terhadap manipulasi informasi. Banyak pengguna media sosial yang menyampaikan opini politik hanya karena tren atau dorongan kelompok sebaya, tanpa pemahaman substansial. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Afrita (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun media sosial efektif untuk kampanye politik, tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran politik yang kritis di kalangan pemilih muda. Bahkan, penelitian Sitorus (2024) mencatat bahwa interaksi politik di Instagram berpotensi memperbesar polarisasi masyarakat, terutama menjelang pemilu. Dalam konteks yang lebih luas, Prabowo (2015) menjelaskan bahwa transisi politik di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan politik. Generasi milenial, yang tumbuh di tengah perubahan ini, lebih cenderung untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memahami dan terlibat dalam politik. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten politik.

Partisipasi politik generasi milenial juga tidak lepas dari pengaruh pencitraan politik yang dilakukan oleh para elite politik di media sosial. Pencitraan ini melibatkan berbagai pendekatan seperti *pure publicity*, *paid publicity*, dan *free ride publicity*, yang digunakan untuk membentuk persepsi positif masyarakat terhadap tokoh atau partai tertentu (Azhar, 2017). Dalam praktiknya, generasi milenial menjadi sasaran utama strategi ini karena mereka adalah pengguna dominan media sosial. Wekke (2019) mengemukakan bahwa strategi komunikasi politik yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik audiens muda, termasuk preferensi mereka terhadap media sosial. Hal ini menjadi penting bagi partai politik untuk merumuskan strategi yang mampu menjangkau generasi milenial secara lebih efisien. Namun, strategi pencitraan ini tidak selalu berdampak positif, karena dapat memperkuat politik simbolik dan mengaburkan substansi dari visi-misi politik itu sendiri.

Dalam konteks ini, penting pula menyoroti temuan dari penelitian Indrawan dkk (2023), yang menunjukkan bahwa generasi milenial lebih responsif terhadap kampanye visual di Instagram dibandingkan pendekatan tekstual formal. Penelitian lain oleh Zis dkk (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengubah pola komunikasi menjadi lebih pasif dan kurang reflektif. Hal ini mendukung pentingnya literasi digital agar partisipasi politik digital tidak hanya bersifat ekspresif, tetapi juga substantif dan kritis. Jika tidak, partisipasi ini hanya akan menciptakan ilusi keterlibatan tanpa pengaruh nyata terhadap proses politik dan pengambilan kebijakan. Sujarweni (2014) mencatat bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan generasi milenial. Dengan memahami bagaimana media sosial memengaruhi partisipasi politik, kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan keterlibatan dan literasi politik di kalangan pemilih muda.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah ruang lingkup yang hanya mencakup generasi milenial di wilayah perkotaan dan terbatas pada platform sosial tertentu. Selain itu, penelitian ini belum mengelaborasi secara mendalam perbedaan pandangan berdasarkan latar belakang gender, pendidikan, dan wilayah. Implikasi dari keterbatasan ini menunjukkan bahwa penelitian lanjutan perlu memperluas cakupan dengan menyertakan kelompok usia dan sosial lain, serta mengkaji dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku politik dalam konteks pemilu, kebijakan publik, dan perubahan sosial yang lebih luas. Literasi digital dan komunikasi politik perlu dirancang lebih sistematis untuk memperkuat demokrasi digital yang partisipatif dan berdaya.

Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai partisipasi politik generasi milenial melalui media sosial, terdapat beberapa aspek tambahan yang perlu dipertimbangkan untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam. Pertama, penggunaan media sosial oleh generasi milenial telah membentuk ruang publik digital yang memungkinkan interaksi politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadi sarana utama bagi mereka untuk mengekspresikan pandangan politik melalui konten visual yang menarik. Hal ini menciptakan ekosistem di mana diskusi politik tidak hanya terjadi di ranah formal, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari di dunia maya. Namun, meskipun akses terhadap informasi politik meningkat, tantangan terkait kualitas dan akurasi informasi tetap menjadi perhatian utama.

Kedua, strategi kampanye politik yang memanfaatkan budaya populer, seperti K-pop dan konten viral, telah digunakan untuk menarik perhatian pemilih muda. Meskipun pendekatan ini efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas, terdapat risiko bahwa substansi politik dapat tergeser oleh hiburan semata. Oleh karena itu, penting bagi aktor politik untuk menyeimbangkan antara daya tarik visual dan penyampaian pesan politik yang bermakna. Ketiga, literasi digital menjadi kunci dalam memastikan partisipasi politik yang sehat di era digital. Kemampuan untuk memilah informasi yang kredibel dari yang menyesatkan sangat penting, mengingat penyebaran berita palsu dapat mempengaruhi persepsi publik dan polaritas politik. Inisiatif seperti edukasi literasi media dan pelatihan verifikasi fakta perlu diperkuat untuk membekali generasi milenial dengan keterampilan kritis dalam menghadapi informasi di media sosial. Keempat, meskipun partisipasi politik melalui media sosial menunjukkan peningkatan, keterlibatan dalam proses politik formal seperti pemilu dan pembuatan kebijakan masih perlu ditingkatkan. Generasi milenial cenderung lebih aktif dalam menyuarakan opini dan mendukung gerakan sosial secara online, namun partisipasi dalam institusi politik tradisional masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan representatif dalam sistem politik untuk mengakomodasi aspirasi generasi muda. Kelima, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami perbedaan partisipasi politik di antara subkelompok generasi milenial berdasarkan faktor seperti gender, tingkat pendidikan, dan lokasi geografis. Studi yang lebih mendalam dapat memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai latar belakang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan politik melalui media sosial. Dengan demikian, strategi yang lebih tepat sasaran dapat dikembangkan untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif di kalangan generasi milenial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi milenial memanfaatkan media sosial sebagai ruang utama untuk berpartisipasi dalam politik di era digital. Melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, mereka terlibat dalam berbagai aktivitas politik seperti menyuarakan isu sosial, mendukung kampanye digital, dan membentuk opini publik. Namun, partisipasi ini lebih bersifat cair, spontan, dan berbasis isu, daripada formal dan terstruktur seperti keikutsertaan dalam partai politik atau organisasi resmi.

Media sosial telah membuka kanal komunikasi baru yang interaktif dan demokratis, sekaligus memunculkan pola partisipasi politik yang lebih personal, ekspresif, dan terkadang dangkal. Tantangan utama dalam konteks ini adalah rendahnya tingkat kesadaran politik yang kritis serta tingginya potensi manipulasi informasi dan polarisasi opini publik. Oleh karena itu, literasi digital politik menjadi sangat penting agar generasi milenial tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor yang aktif, reflektif, dan berdaya dalam membentuk arah politik bangsa.

Partai politik, pemerintah, dan aktor demokrasi lainnya perlu merumuskan strategi komunikasi politik yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis isu agar dapat menjangkau generasi milenial secara lebih efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya memperluas studi ke wilayah non-perkotaan dan kelompok usia lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang arah baru politik di era digital. Pada akhirnya, media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga medan perjuangan demokrasi yang terus berkembang.

Untuk memperkuat demokrasi digital yang partisipatif dan berdaya, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan representatif dalam sistem politik untuk mengakomodasi aspirasi generasi muda. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital dan politik, serta pengembangan strategi komunikasi politik yang efektif dan sesuai dengan karakteristik generasi milenial. Dengan demikian, generasi milenial dapat berperan lebih aktif dan substantif dalam proses politik dan pengambilan kebijakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, D. (2020). *Gerakan Sosial Online dan Demokrasi*. Jurnal Studi Pemuda.
- Afrita, J. (2024). Pemilu 2024: Meninjau dampak kampanye media sosial terhadap politik. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 9(2), 83-95.
- Andriadi, F. (2020). *Partisipasi Politik Virtual: Demokrasi Netizen di Indonesia*. Jakarta: RMBooks.
- Azhar, A. A. (2017). *Pencitraan politik elektoral: Kajian politik segitiga PAN dalam merebut simpati masyarakat*. Yogyakarta: Atap Buku.
- Baihaqi, A. (2020). *Digital Democracy: Youth Participation in Indonesian Elections*. Journal of Southeast Asian Politics.
- Baihaqi, M. R. (2020). *Demokrasi digital: Memahami dampak dan tantangan*. Kubuku. Budoyono, S. (2020). Pengajaran Bahasa dan Sastra di Era Digital (Era Digital, Era
- Indrawan, J. dkk. (2023). *Visual Campaigns and Youth Engagement*. Asian Journal of Communication.
- Indrawan, J., dkk. (2023). Instagram sebagai media komunikasi politik bagi generasi milenial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Jones, R. (2020). Identity politics in the digital age: The role of social media. *Political Studies Review*.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*.
- Mahfud MD, M. (2007). Gerakan Sosial dan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, M. F. (2020). Demokrasi Digital dan Transformasi Politik di Indonesia. Jakarta: Masyarakat Global). *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(1), Hal 1-8.
- Nasution, F. (2020). *Pilkada dan Media Sosial: Pergeseran Partisipasi Milenial*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Penerbit Demokrasi.
- Prabowo, D. A. (2015). Transisi Politik di Indonesia: Dari Pemilihan Umum ke Pemerintahan Baru. Jakarta: Penerbit Demokrasi Indonesia.
- Ramadhan, M. (2021). Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Setiawan, A. (2020). Pentingnya Literasi Digital dalam Menghadapi Disinformasi Politik di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 10(2), 101-113.
- Sitorus, H. J. (2024). Polarisasi politik melalui interaksi sosial di Instagram: Studi kasus pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(2), 383–394.
- Smith, A. (2018). Digital politics: How social media is reshaping political participation. *Journal of Political Communication*.
- Strauss, A. C. (2003). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Teknik-teknik dan Prosedur untuk Pengumpulan dan Analisis Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif.
- Sukmajati, M. (2019). Politik Simbolik dan Generasi Milenial: Studi Partisipasi Politik di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 44-58.
- Sukmajati, R. (2019). *Politik Simbolik di Era Digital*. Jurnal Ilmu Politik Nasional.
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
- Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Zis, S. F., dkk. (2021). Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z Di Era Digital. *Jurnal Satwika*, 5(1), 69-87.